

# KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

03 Oktober 2023

## Temuan Pemborosan Rp 1,6 Miliar oleh BPK, Inspektorat Mataram Anggap Perbedaan Penafsiran

Miq Ade - Selasa, 3 Oktober 2023 | 06:50 WIB



Baiq Nelly Kusumawati (Zad/Lombok Post)

**LombokPost**–Istilah **temuan pemborosan** dalam laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram merupakan diksi auditor. Hal ini memungkinkan terjadi bila terdapat perbedaan pemahaman dalam menafsirkan aturan.

"Itu bahasa **audit**," kata **Inspektur Kota Mataram** Baiq Nelly Kusumawati, Senin (2/10).

Sebagaimana diketahui dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) **BPK RI** terhadap laporan keuangan Pemerintah **Kota Mataram** tahun 2022 muncul **temuan pemborosan** pembayaran honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana. **Temuan pemborosan** itu tersebar di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp 1,6 miliar.

Nelly menekankan tidak ada pelanggaran norma atau ketentuan dalam pembayaran honorarium itu. Pemkot Mataram memiliki penafsiran khususnya terhadap Peraturan Presiden (**Perpres**) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Regional sebagai acuan dalam pemberian honorarium.

"(**Temuan pemborosan**) bukan untuk rekomendasi pengembalian, lebih pada perbedaan persepsi antara kami di pemerintah **Kota Mataram** dengan pihak **BPK**," jelasnya.

Namun demikian, Nelly menegaskan **opini pemborosan** yang disampaikan **BPK** adalah bagian dari perbaikan yang sangat penting bagi pemkot. Sehingga ke depan akan meningkatkan dan menyempurnakan akuntabilitas laporan keuangan.

"**Perpres** 33 dan perwal itu sudah benar, standar juga sudah benar. Pemberian honor tim juga sesuai SSH," tekannya.

Kebenaran itu didasari pada argumentasi pembuatan Peraturan Wali Kota (Perwal) telah mengacu ketentuan dan peraturan yang ada. "Semuanya telah melalui kajian hukum," paparnya.

Persepsi itu juga telah dipersentasikan pada pihak **BPK** untuk menggambarkan dasar penerbitan perwal. Begitu juga dasar argumentasi dibutuhkannya tim Pelaksana dan Tim Sekretariat Pelaksana.

"Keberadaan tim ini benar dan riil. Punya kinerja dan output yang jelas, kita meyakini itu dan memang riil kita butuhkan," paparnya.

Sementara untuk **temuan BPK** yang rekomendasinya meminta pengembalian juga telah dipatuhi. "Itu semua sudah selesai disetor, sesuai tenggat waktu yang diberikan **BPK**," paparnya.

Nelly kembali menegaskan hal ini murni insiden perbedaan persepsi dalam mengkaji aturan. Pihaknya juga menghormati dan berterima kasih atas catatan yang diberikan **BPK**. Hal itu sangat berarti untuk memperbaiki laporan keuangan pemerintah ke depannya.

"Insting profesional auditor sangat tajam, mereka pasti tahu mana yang murni karena perbedaan penafsiran atau karena memang ada unsur mens rea-nya. Oleh karenanya kami berterima kasih, sehingga ini akan sangat penting agar ke depan kami bisa lebih tertib dan lebih baik lagi," paparnya.

Atas perbedaan persepsi itu, pihaknya juga telah diminta berkonsultasi ke pemerintah pusat. Sehingga mendapatkan pandangan dan persepsi yang jelas dan utuh terhadap ketentuan yang mengatur dalam pemberian honorarium sebagaimana diatur dalam **Perpres 33**.

"Kami saat ini sedang melakukan itu (berkonsultasi) sehingga semuanya dipastikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tegasnya.

**Temuan pemborosan** di 11 OPD itu antara lain dinas kesehatan **pemborosan** Rp 102,1 juta; dinas sosial Rp 31,6 juta; dinas tenaga kerja Rp 4,95 juta; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Rp 3,15 juta.

Selanjutnya, Diskoperin UKM Rp 10,4 juta; Setda Bagian Administrasi Pembangunan Rp 38,4 juta; Setda Bagian Pemerintahan Rp 32,5 juta; Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Rp 690 juta.

Setda DPRD Kota Mataram pemborosan Rp 302,4 juta; Bappeda Rp 378,75 juta; Balitbang Rp 9,95 juta. Sehingga total keseluruhan pemborosan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp 1.604.200.000.

Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri sebelumnya mengatakan temuan itu menggambarkan tentang catatan keseluruhan pemborosan pembayaran honorarium. Sehingga angka yang tertulis menjadi sangat besar. "Bisa saja globalnya saja disebut sebagai pemborosan. Betul (termaktub dalam temuan BPK), tetapi yang kita tindak lanjuti adalah rekomendasi," tegasnya. (zad)